



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTASI PEMERINTAH (LAKIP)

2024

**Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 masih tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus dilakukan. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Koba, Februari 2025
Kepala Dinas,



dr.Hj.DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
NIP. 19710527 200501 2 008

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1. **“Meningkatnya Capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate(mCPR)”**

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

(a) Persentase Capaian Contraceptive Prevalence Rate (mCPR),

Formulasi Perhitungan :

$$\text{mCPR} = \frac{\text{Jumlah pasangan usia subur aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$$

- Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 3 (tiga) Program, yakni Program Pengendalian Penduduk, Program Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga (KS).
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 77,10%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 80,80%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 104,79%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 77,28 % terjadi peningkatan sebesar 3,52%. (realisasi tahun ini - realisasi tahun lalu)
2. Capaian sasaran strategis 2 **“Meningkatnya Peranan OPD dalam penganggaran yang responsive gender”**
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. **Persentase OPD yang melaksanakan anggaran yang responsive gender.**

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki ARG}}{\text{Semua OPD}} \times 100\%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar .80 %; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 80 %. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100 %.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 70 % terjadi kenaikan sebesar 10 %.
3. Capaian sasaran strategis 3 **“Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan”**
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

(a) Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100\%$$

- Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Perlindungan Perempuan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 0,021 %; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 0,028 %. Untuk kasus yang semakin sedikit maka kinerja semakin baik maka

digunakan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/6/2003, Dengan demikian capaian ini belum memenuhi target. Prosentase capaian terhadap target mencapai 66,66 %.

- Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 0,020 % terjadi peningkatan sebesar 0,008 %.

4. Capaian sasaran strategis 3 **“Menurunnya angka kekerasan terhadap anak”**

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani

Formulasi Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$$

- Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Perlindungan Khusus Anak (PKA)
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100 %; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100 %. Dengan demikian capaian ini telah tercapai. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100 %.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 100 % tidak terjadi peningkatan realisasi karena sama dengan tahun sebelumnya. Semua korban dilayani

5. Capaian sasaran strategis 3 **“Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja OPD”**

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

Nilai SAKIP DPPKBPPPA ,Formula Perhitungan : Perolehan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) oleh Inspektorat.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 80 %; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 75,25 %.ini merupakan hasil AKIP Tahun 2023, Dengan demikian capaian ini telah tercapai. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 94,06 %.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 80 % tidak terjadi peningkatan realisasi karena sama dengan tahun sebelumnya.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah ke depan, sebagai berikut :

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender disemua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
2. Masih Kurang nya Kepercayaan Perempuan terhadap calon wakil rakyat
3. Angka Anak Putus Sekolah Masih tinggi,
4. Masih adanya tindak kekerasan terhadap anak,
5. Pemahaman untuk ber-KB masih Kurang terutama rendahnya penggunaan MKJP.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
DAFTAR ISI.....	8
 BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Cascading Kinerja ,Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur	10
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	12
1.3 Isu-isu Strategis.....	15
1.4 Landasan Hukum	16
1.5 Sistematika	17
1.6 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	18
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024.....	23
 BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	24
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	27
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	30
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2024	31
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	35
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2024	41
3.2. Realisasi Anggaran	52
 BAB IV PENUTUP	61
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggung- jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297,
4. Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 (LD 319), Noreg (6.61/2023), tanggal 28 Desember 2023.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

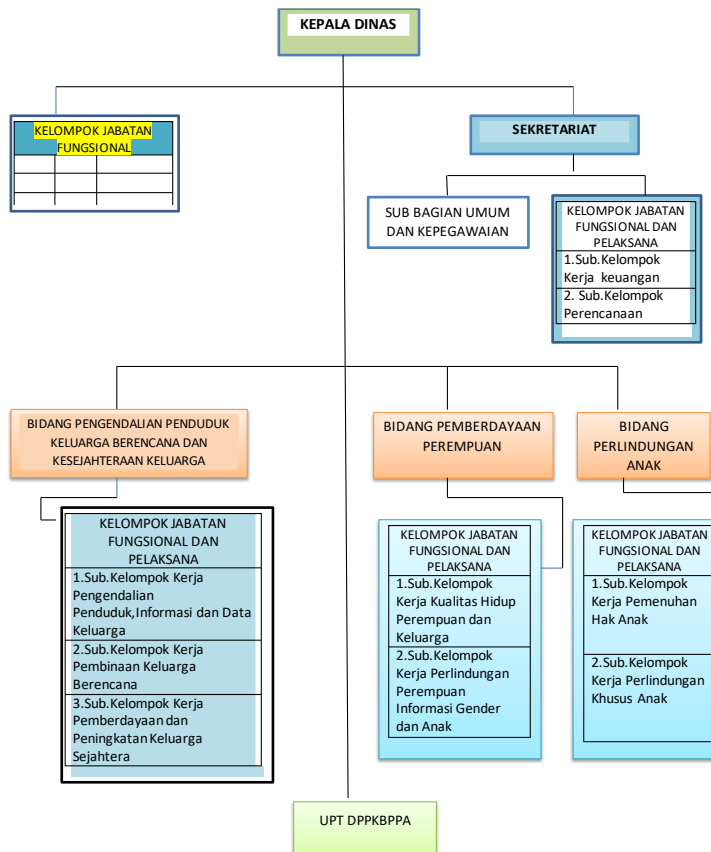
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar I.1 Struktur Organisasi DPPKBPPA



Sumber data:Bagiam Kepegawaian (Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan)

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RKPD Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bangka Tengah memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

1.2 Tugas dan Fungsi dan peta Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

2. Sekretariat,

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas memimpin,

menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada lingkup Sekretariat, serta mengoordinasikan bidang-bidang sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Kelompok kerja Keuangan; dan
- c. Sub Kelompok kerja Perencanaan.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga, membawahi :

- a. Sub Kelompok kerja Pengendalian Penduduk, Informasi, dan Data Keluarga;
- b. Sub Kelompok kerja Pembinaan Keluarga Berencana; dan

- c. Sub Kelompok kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

- a. Sub Kelompok kerja Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
- b. Sub Kelompok kerja Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak.

5. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Anak, membawahi :

- a. Sub Kelompok kerja Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. Sub Kelompok kerja Pemenuhan Hak-hak Anak

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

UPT PPA merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dan dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga memiliki Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang

memiliki tujuan “Meningkatkan SDM yang Unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa”, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Masih tingginya pernikahan usia dini
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap Anak
4. Masih rendahnya pengetahuan dan penggunaan alat kontrasepsi jenis jangka panjang
5. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh lapangan KB
6. Masih adanya kesenjangan perempuan dibidang ekonomi,
7. Masih rendahnya akses perempuan diseluruh bidang pembangunan yang diterima oleh perempuan.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1189);
5. Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 (LD 319), Noreg (6.61/2023), tanggal 28 Desember 2023;

1.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

1.6 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAK I-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL	7	4	3			7	4	3			5	2
1	Kepala Dinas		1					1					1
2	Sekretaris			1					1			1	
3	Kepala Bidang		3					3				3	
4	Kasubbag/kepala UPT			2					2			1	1
B	JABATAN FUNGSIONAL	6		5	1		6		5	1		2	4
1	Sub.Kelompok	6		5	1				5	1		2	4
C	JABATAN PELAKSANA	16		13	3		16		13	3		4	12
1	Pelaksana	16		13	3				13	3		4	12
D	PPPK/PHL	14		1	1	12	14		1	1	12	12	2
1	PKK	8		1	1	6			1	1	6	6	2
2	Penjaga Balai	6				6					6	6	
	JUMLAH	43	4	22	5	12	43	4	22	5	12	23	20

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah relatif tinggi dan hampir merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang (51,16%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang (9,30%), D3 sebanyak 5 orang (11,62%), SLTA/SMP sebanyak 12 orang (27,90 %), Komposisi pegawai perempuan telah sebanding dengan jumlah pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

TABEL I.2 ASSET TAHUN 2024

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah		174.154.000,00
2	Peralatan dan mesin		9.234.173.315,82
3	Gedung dan bangunan		4.652.224.633,36
4	Jalan, irigasi dan jaringan		188.342.123,00
5	Aset tetap lainnya		-
6	Konstruksi dalam pengerjaan		32.800.000,00
Total			14.281.694.072,18

Pada Tahun 2024 Total Asset Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Yaitu sebesar Rp.14.281.694.072,18

Terkait Kendaraan Operasional Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari yakni 1(Satu)unit kendaraan dinas jabatan,7(Tujuh) unit kendaraan operasional, 67(Enam Puluh Tujuh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, ruang dapur, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor

berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik sesuai dengan kebutuhan. Namun Untuk Peralatan kantor seperti laptop (Note Book) 50% dalam keadaan kurang Baik dan sudah tidak sesuai spesifikasi perkembangan Informasi Teknologi (IT).

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah
2023	9.856.687.000	312.500.000	10.169.187.000
2024	8.863.914.600	0	8.863.914.600

Sumber data : PPK_SKPD DPPKBPPPA 2024

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 terdiri dari APBD DAN DAK NF. Berasal dari APBD Rp.5.568.074.600 dan DAK NF BOKB Rp.2.775.840.000, DAK NF PPPA Rp.520.000,- yang didukung oleh 9 Program, 25 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp.1.305.272.400. Total anggaran belanja sebesar Rp 8.863.914.600,-. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan anggaran yang mendukung untuk membiayai program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel I.3 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024

No	Program	Anggaran Perubahan
1.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	88.980.000,-
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	263.930.000,-
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	121.490.000,-
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	54.510.000,-

No	Program	Anggaran Perubahan
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PKA)	307.062.500,-
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.753.951.100,-
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	217.058.000,-
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	1.761.578.000,-
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	1.295.355.000,-
	TOTAL	8.863.914.600,-

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Nomor : 710/69/ITKAB/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP DPPKBPPPA Bangka Tengah TA. 2024 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyempurnaan pohon kinerja dengan memastikan telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang 2. Melakukan penyempurnaan cascading agar penjabaran kinerja semakin selaras dan berkesinambungan sampai ke 	<p>Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyempurnaan pohon kinerja yang memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat 2. Melakukan penyempurnaan cascading yang memuat penjabaran kinerja semua pegawai DPPKBPPPA 3. Menyusun Kembali Perjanjian Kinerja 2024 yang sesuai

	<p>level individu</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan penyempurnaan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai ke level individu yang diselaraskan dengan pohon kinerja dan cascading 4. Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian target kinerja secara berkala sampai ke level individu. 5. Menyusun Laporan Kinerja secara berkala dan mendokumentasikan hasil revidi Laporan Kinerja secara berjenjang 	<p>dengan (selaras) Cascading dan SKP dalam e kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mendokumentasikan hasil Monev capaian kinerja bersama kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang 5. Mendokumentasikan Pembahasan dan penyusunan LAKIP bersama Tim
--	--	---

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2024*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah

“ Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin Unggul”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan Iman dan Taqwa;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan;
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada **Misi ke-1**, yaitu :

“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas Berlandaskan Imam dan Taqwa”

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah selama lima tahun anggaran adalah :

1. Menurunnya Angka Total Fertility Rate(TFR)
2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan
3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Terhadap Anak.

Tabel II.1.1 Tujuan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN		
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	6	7	
1.	Menurunnya Angka Total fertility Rate(TFR)	Persentase capaian Angka Total fertility Rate(TFR)	Persentase	2,38	2,28	95,79
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase Capaian Indeks pembangunan Gender (IPG)	Persentase	91,29	92,19	100,98
3	Meningkatnya Pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	1.Persentase Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persentase	63,50	56,60	89
		2.Persentase capaian indeks perlindungan Khusus Anak(IPKA)	Persentase	76,30	80,53	105,54
4	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase	BB(80)	BB(75,25)	94,06

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa:

Tujuan Strategis 1.Menurunnya Angka Total Fertiliy Rate(TFR) dengan realisasi 2,28% atau capaian 95,79% menunjukan keberhasilan dalam menekan angka rata-rata kelahiran dalam keluarga(rata-rata satu keluarga memiliki anak 2 sampai 3).Data Bersumber dari BPS.

Tujuan Strategis 2.Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan realisasi 92,19% atau capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 100,98%.ini menunjukan data tahun 2023 karena data

belum Rilis dari BPS.

Tujuan Strategis 3. Meningkatnya Pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Indikator 1: Persentase Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 63,50% atau capaian kinerja sebesar 89 %, data bersumber dari kementerian PPPA yang di Rilis bulan desember 2024. Faktor yang mendukung indikator ini adalah memperoleh Predikat Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Nindya, adanya sinergisitas Gugus Tugas KLA mulai dari lembaga eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Faktor Penghambat adalah masih tingginya angka putus sekolah.

Indikator 2 : Persentase capaian indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dengan realisasi 80,53% atau capaian kinerja sebesar 105,54%, data ini bersumber dari kementerian PPPA, Faktor Pendukung : Peranan Lembaga layanan anak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sudah berjalan aktif. Faktor Penghambat : Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak.

Tujuan Strategis 4 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dengan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD telah tercapai yaitu Nilai SAKIP DPPKBPPA dengan nilai 75,25(BB).

Adapun sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah dalam waktu lima tahun setelah Perubahan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian mCPR (Modern contraceptive Prevalensi Rate)
2. Meningkatnya Peran OPD dalam Penganggaran yang responsive Gender,
3. Menurunnya Angka Kekerasan terhadap perempuan
4. Menurunnya Angka Perkawinan anak,
5. Menurunnya Angka Kekerasan terhadap anak.

Tabel II.1.2 Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya capaian contraceptive Prevalensi Rate(mCPR)	Persentase capaian contraceptive Prevalensi Rate(mCPR)	Persentase	69,48	70,50	77,10	80,90	80,95	80,95
2.	Meningkatnya Peran OPD dalam Penganggaran yang Responsive Gender	Persentase OPD yang melaksanakan Penganggaran yang Responsive Gender	Persentase	-	60	80	85	90	90
3	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase	0,024	0,022	0,021	0,020	0,019	34,50
4	Menurunnya Angka Perkawinan Anak	Persentase Perkawinan Anak	Persentase	23,20	23,00	21,90	20,85	19,75	19,75
5.	Menurunnya Angka Kekerasan terhadap anak	Persentase Korban kekerasan anak yang terlayani	Persentase	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di OPD	Nilai	80	80	80	80	80	80

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Capaian Contraseptive Prevalensi Rate(mCPR)	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan KB melalui Optimalisasi Fasilitas Pelayanan KB	Peningkatan Komitmen dan kepedulian stakeholder dalam pemenuhan akses dan pelayanan untuk menunjang program KB.
2.	Meningkatnya peran OPD dalam penganggaran yang responsif gender	Meningkatkan penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
3.	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan	Meningkatkan akses di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik, dan teknologi bagi perempuan melalui pemberdayaan perempuan di segala bidang	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha - Peningkatan kapasitas SDM terlatih Pengarusutamaan Gender
		Meningkatkan pemahaman tentang resiko perkawinan di usia anak	Meningkatkan kegiatan sosialisasi, mencetak spanduk, baliho dan sebagainya tentang resiko perkawinan usia anak
4	Menurunnya angka kekerasan terhadap anak	Meningkatkan advokasi, promosi, sosialisasi kepada seluruh lapisan tentang kekerasan terhadap anak	- Membuat peraturan-peraturan daerah atau kebijakan yang bisa menekan angka kekerasan terhadap anak
			-Membuat sosialisasi dan mencetak spanduk, baliho dan sebagainya tentang kekerasan terhadap anak
		Meningkatkan pemahaman tentang resiko perkawinan di usia anak	Meningkatkan kegiatan sosialisasi, mencetak spanduk, baliho dan sebagainya tentang resiko perkawinan usia anak

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1.Meningkat nya Capaian Modern Contraceptive Prevalensi Rate(mCPR)	1.1. Program Pengendalian Penduduk	240.529.200	217.058.000	(23.471.200)
	1.1.1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	74.829.200	42.138.000	(32,691.200)
	1.1.2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	165.700.000	174.920.000	9.220.000
	1.2. Program Keluarga Berencana (KB)	1.880.483.000	1.761.578.000	(118.905.000)
	1.2.1.Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	869.800.000	846.100.000	(23.700.000)
	1.2.2.Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	420.000.000	420.000.000	0
	1.2.3.Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	441.433.000	346.228.000	0

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
	1.2.4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	149.250.000	149.250.000	0
	1.3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)	1.304.905.000	1.295.355.000	(9.550.000)
	1.3.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.304.905.000	1.295.355.000	(9.550.000)
2. Meningkatnya peran OPD dalam melaksanakan penganggaran yang responsif gender	2.1. Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	110.000.000	75.729.600	(15.651.000)
	2.1.1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	27.390.000	(2.610.000)
	2.1.2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan Kabupaten/kota	40.000.000	37.000.000	(3.000.000)
	2.1.3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	40.000.000	24.590.000	(15.410.000)

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
3.Menurun nya angka kekerasan terhadap perempuan	2.2. program Perlindungan Perempuan	302.140.000	263.930.000	(38.210.000)
	2.2.1.Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	0
	2.2.2.Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	119.240.000	(30.760.000)
	2.2.3.Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.140.000	79.690.000	(7.450.000)
	2.3.Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100.000.000	121.490.000	21.490.000
	2.3.1.Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	121.490.000	21.490.000
4.Menurunnya Angka Perkawinan Anak	3.1.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	95.000.000	54.510.000	(40.490.000)
	3.1.1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95.000.000	54.510.000	(40.490.000)

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
5. Menurun nya angka kekerasan terhadap Anak	3.2. Program Perlindungan Khusus Anak (PKA)	303.510.000	307.062.000	3.552.500
	3.2.1. kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	0
	3.2.2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.600.000	182.360.000	30.760.000
	3.2.3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.910.000	59.702.500	(27.207.500)
5. Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja OPD	3.3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.752.596.800	4.753.951.100	1.354.300
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	20.000.000	11.550.000	(8.450.000)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.631.775.000	3.698.288.800	66.513.800
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	0	(25.000.000)
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10.000.000	6.800.000	(3.200.000)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.440.000	186.940.000	(2.500.000)

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.541.800	425.616.300	(24.925.500)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	425.840.000	424.756.000	(1.084.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		9.089.164.000	8.863.914.600	(225.249.400)

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Bangka Tengah sebagai berikut:

**Tabel II.4.1 Perjanjian Kinerja (PK) induk
DPPKBPPPA Bangka Tengah
Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Capaian Contraseptive Prevalensi Rate (CPR)	Persentase Capaian Contraseptive Prevalensi Rate (CPR)	%	75,04
2	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	36,40
3	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	%	0,021
4	Menurunnya Angka Perkawinan Anak	1.Persentase Perkawinan Anak	%	23

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
		2. Persentase desa layak anak	%	30
5	Menurunnya angka kekerasan terhadap anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100

Pada tahun 2024, DPPKBPPPA Bangka Tengah melaksanakan reviu terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya perubahan dan ketidaksinkronan tujuan dan sasaran serta target kinerja di DPPKBPPPA sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom sasaran dan indikator Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 agar kinerja DPPKBPPPA Bangka Tengah Lebih Terukur. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.4.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala DPPKBPPPA Bangka Tengah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Capaian Modern Contraceptive Prevalensi Rate (mCPR)	Persentase Capaian Modern Contraceptive Prevalensi Rate (mCPR)	%	77,10
2	Meningkatnya Peran OPD dalam melaksanakan Penganggaran yang Responsive	Persentase OPD dalam melaksanakan /mengimplemtasikan Penganggaran yang Responsive	%	80
3	Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	%	0,021
4	Menurunnya angka kekerasan terhadap anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
5	Terwujudnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	80

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja ada sedikit perubahan pada bahasa dan target karena menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan anggaran berkurang Rp. **225.249.400** atau sebesar 11,02% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan efisiensi anggaran untuk seluruh pembiayaan program dan kegiatan di DPPKBPPPA tahun 2024.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Realisasi Anggaran
3. Efisiensi Penggunaan sumber Daya
4. Inovasi

DPPKBPPPA Bangka Tengah telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala DPPKBPPPA Bangka Tengah dengan Bapak Bupati Bangka Tengah tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh DPPKBPPPA Bangka Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis

DPPKBPPPA Bangka Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2021	REALISASI CAPAIAN 2022	REALISASI CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RENSTRA
							TARGET	REALISASI	% Capaian	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Capaian Modern Contraseptive Prevalensi Rate (mCPR)	Persentase Capaian Modern Contraseptive Prevalensi Rate (mCPR)	%	75,46	70,77	77,28	77,10	80,8	104,79	Sangat Baik	80,95
2	Meningkatnya Peran OPD dalam Melaksanakan Penganggran yang Responsive Gender	Persentase OPD dalam Melaksanakan/Mengemplentasikan Penganggran yang Responsive Gender	%	-	-	60	80	80	100	Sangat Baik	90
3	Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	0,020	0,020	0,020	0,021	0,028	66,66	Sedang	0,019
4	Menurunnya angka kekerasan terhadap anak	persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Baik	100
5	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	%	-	77.30	75,25	80	75,25	94,06	Sangat Baik	80

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Capaian Modern Contraseptive Prevalensi Rate (mCPR)	Persentase Capaian Modern Contraseptive Prevalensi Rate (mCPR)	$\text{CPR} = \frac{\sum \text{pus aktif}}{\sum \text{pus}} \times 100$
2	Meningkatnya Peran OPD dalam Penganggaran uang responsive gender	Persentase OPD dalam mengimplemtasikan Penganggaran uang responsive gender	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki ARG}}{\text{Jumlah Semua OPD}} \times 100$
3	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100$
4	Menurunnya angka kekerasan terhadap anak	persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100$
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPKBPPPA	Nilai SAKIP dari ITKAB

Adapun analisis kinerja sasaran di DPPKBPPPA dari tabel Tabel III.2 dapat dijabarkan sebagai berikut :

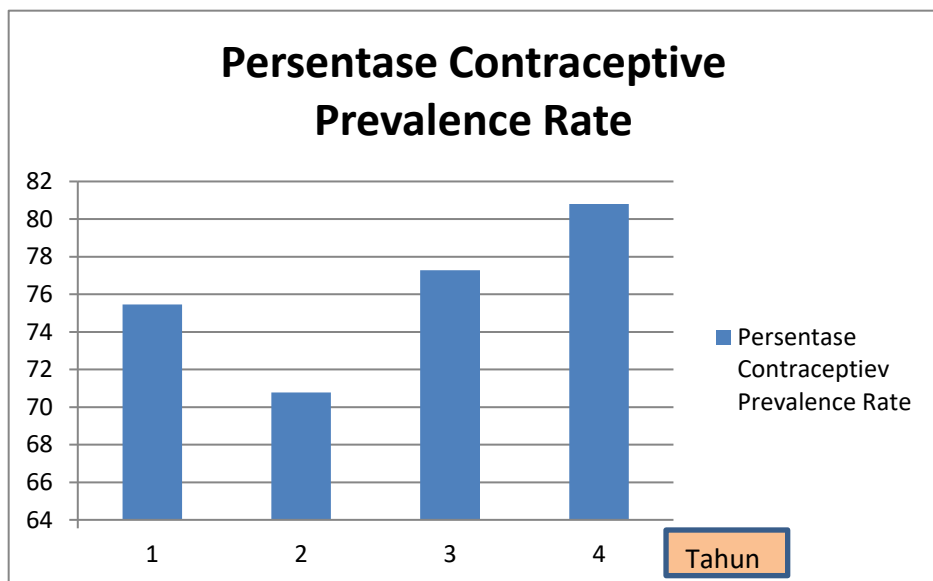
Kinerja sasaran 1 : Meningkatnya Capaian Modern Contraseptive Prevalensi Rate (mCPR)

Kinerja Sasaran Meningkatnya Capaian Modern Contraseptive Prevalensi Rate (mCPR) diukur dengan menggunakan perhitungan Jumlas PUS aktif Modern dibagi dengan Jumlah PUS dikali 100%. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 80,80% atau sebesar 104,79% dari target 77,10%. Dengan kategori capaian sangat baik. Kenaikan mCPR dari tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar ±

10% dalam kurun waktu tiga tahun. Capaian kinerja ini didukung oleh kesadaran tinggi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber KB sudah tinggi. Namun ada ada faktor Penghambat lain yaitu Peralihan dari Non MKJP ke MKJP masih belum optimal. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan target renstra akhir RPJMD 72,01% capaian CPR telah terpenuhi, Seperti Terlihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel III.4. Persentase Contraceptive Prevalence Rate(mCPR)
Tahun 2021-2024**

Tahun	(1)2021	(2)2022	(3)2023	(4)2024
Persentase Contraceptive Prevalence Rate(mCPR)	75,46	70,77	77,28	80,8



Sumber data: DPPKBPPPA Bangka Tengah, 2024

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE 2021	REALISASI CAPAIAN 2022	REALISASI CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				CAPAIAN S.D 2024 TERHADAP TARGET 2026
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Capaian Modern Contraceptive Prevalensi Rate (mCPR)	75,46	70,77	77,28	77,10	80,8	104,79	80,95	129,45

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Capaian Modern Contraceptive Prevalensi Rate (mCPR) adalah sebagai berikut :

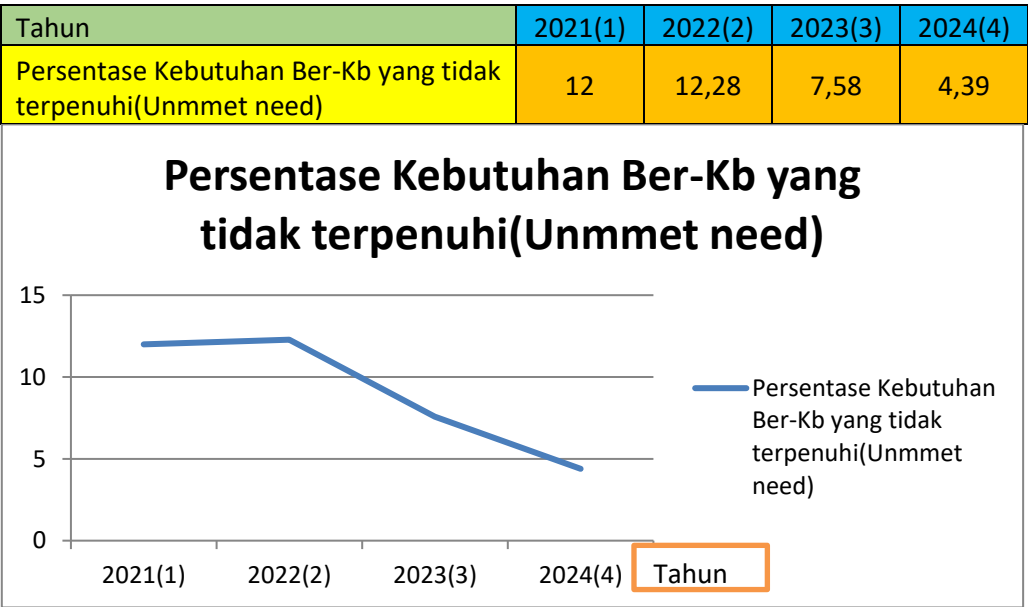
- 1.Tercapainya 80,80 % dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 104,79% (terlampau).
- 2.Dibanding realisasi tahun lalu (2023) sebesar 77,28%,terhadap target 75,02%,maka terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 3,53%.
- 3.Dibanding dengan target akhir RENSTRA,maka sasaran berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Capaian Modern Contraceptive Prevalensi Rate (mCPR) tersebut didukung dari program sebagai berikut :

- 1.Program Pengendalian Penduduk dengan sasaran Program Meningkatnya Jumlah sekolah siaga kependudukan yang dibentuk dengan indikator persentase meningkatnya Jumlah sekolah siaga kependudukan yang dibentuk.
- 2.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB),dengan sasaran Program Menurunnya cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) dengan indikator Persentase

menurunnya cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need). Pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 3,19%. Penurunan unmet need tersebut mengindikasikan komitmen pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam perluasan akses pelayanan kontrasepsi yang berkorelasi pada peningkatan mutu pelayanan publik pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Hal ini selaras dengan target pemerintah pusat di level nasional dalam upaya meraih target SDG's untuk 2030 mendatang dengan jargon **“No-one left behind”** guna peningkatan pelayanan dan kualitas mutu pada akses kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan meyakinkan bahwa tidak seorang pun yang terlewatkan. seperti terlihat pada tabel diagram dibawah ini :

Tabel III.6. Persentase Kebutuhan Ber-Kb yang tidak terpenuhi(Unmeet need) Tahun 2021-2024



Sumber data:DPPKBPPPA Bangka Tengah Bid.PPKB,2024

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan sasaran Terlaksananya Kelompok kegiatan yang dibina dan indikator Persentase Cakupan kelompok kegiatan yang dibina.

Faktor Pendukung Tercapainya target indikator sasaran program ini adalah :

1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan KB termasuk alokasi serta Penyuluh KB dan Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) / Kader KB di tiap desa/kelurahan se-Kabupaten Bangka Tengah. Adanya Pelayanan KB Bergerak setiap bulan.
2. Adanya Dukungan Pemerintah Pusat dengan memberikan Dukungan Dana Alokasi Khusus BOKB dari BKKBN

Faktor Penghambat Tercapainya target indikator sasaran program ini adalah :

1. Masih rendahnya capaian kepesertaan KB Pria
2. Adanya kecenderungan banyak pasangan muda yang ber-KB secara Tradisional.

Solusi / Upaya yang telah dilakukan untuk Peningkatan Kinerja 2024 adalah Pengaktifan kelompok KB Pria dan Meningkatkan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) tentang keluarga Berencana.

Kinerja sasaran 2 : Meningkatnya Peran OPD dalam Penganggaran uang responsive gender

Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran OPD dalam Penganggaran uang responsive gender diukur dengan formula perhitungan Jumlah OPD yang memiliki ARG dibagi Jumlah OPD dikali 100%.

Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 80 % atau sebesar 100% dari target 80%. Dengan kategori capaian sangat baik,dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel III.7. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2022	REALISASI/ CAPAIAN/ 2023	TAHUN 2024				CAPAIAN S.D 2024 TERHADAP TARGET 2026
					TAR GET	REALI SASI	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	
1	3	5	6		7	8	9		
1	Persentase OPD dalam Melaksanakan/Mengemplantasikan Penganggaran yang Responsive Gender	-	-	60	80	80	100	90	88,88

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Peran OPD dalam Melaksanakan/Mengemplantasikan Penganggaran yang Responsive Gender adalah sebagai berikut :

- 1.Tercapai 80%,dengan demikian Prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% tercapai.
- 2.Di banding realisasi tahun lalu (2023) sebesar 60% terhadap target tahun lalu 60%,maka terdapat peningkatan sebesar 20%.
- 3.Di banding dengan akhir Rensta,maka sasaran berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase OPD dalam Melaksanakan/Mengemplantasikan Penganggaran yang Responsive Gender tersebut didukung dari program sebagai berikut :

- 1.Program PengarusUtamaan Gender (PUG),dengan sasaran Meningkatnya Implementasi PengarusUtamaan Gender(PUG) dan indikator Persentase perangkat daerah dan jejaringnya yang sudah dilatih PUG (Pengarusutamaan

Gender).

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga,dengan sasaran Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak

Faktor Pendukung Tercapainya target indikator sasaran program diatas adalah :

- 1.Adanya bimbingan teknis tentang Gender bagi seluruh perencana di OPD
- 2.Terbentunya Tim Fokal Ponit bagi seluruh secretariat disleuruh OPD
- 3.Terbentuknya Tim Driver bagi OPD yang menggerakan seluruh OPD
- 4.Adanya Perda No.01 tentang Pengarus Utamaan Gender(PUG) dalam Pembangunan Daerah

Faktor Penghambat Tercapainya target indikator sasaran program ini adalah :

- 1.Masih rendahnya pemahaman tentang pembangunan Gender
- 2.Masih belum maksimalnya proses pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PengarusUtamaan Gender oleh Tim Driver.
- 3.Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan.

Solusi /Upaya yang telah dilakukan untuk Peningkatan Kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada Tim sekretariat PUG Khususnya Perencanaan OPD tentang PUG
2. Penetapan Tim Kelompok Kerja,Tim Teknis dan Tim Driver PengarusUtamaan Gender (PUG) kabupaten Bangka Tengah dengan keputusan Bupati.
3. Menginventarisasi Anggaran Kegiatan dengan membuat GAP/GBS.

Kinerja sasaran 3: Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan

Kinerja Sasaran Meningkatnya Menurunnya Angka Kekerasan terhadap perempuan dengan indikator Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO ,diukur dengan formula perhitungan : Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikali 100%.

Pada Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 0,028% atau sebesar 99,93% dari target 0,021%. Dengan kategori capaian Sangat Baik.untuk Penjelasan sasaran dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.8. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2022	REALISASI CAPAIAN/ 2023	TAHUN 2024				CAPAIAN S.D 2024 TERHADAP TARGET 2026
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	
1	3	5	6		7	8	9		
1	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0.020	0,020	0,020 /90,90	0,021	0,028	66,66	0,019	52,63

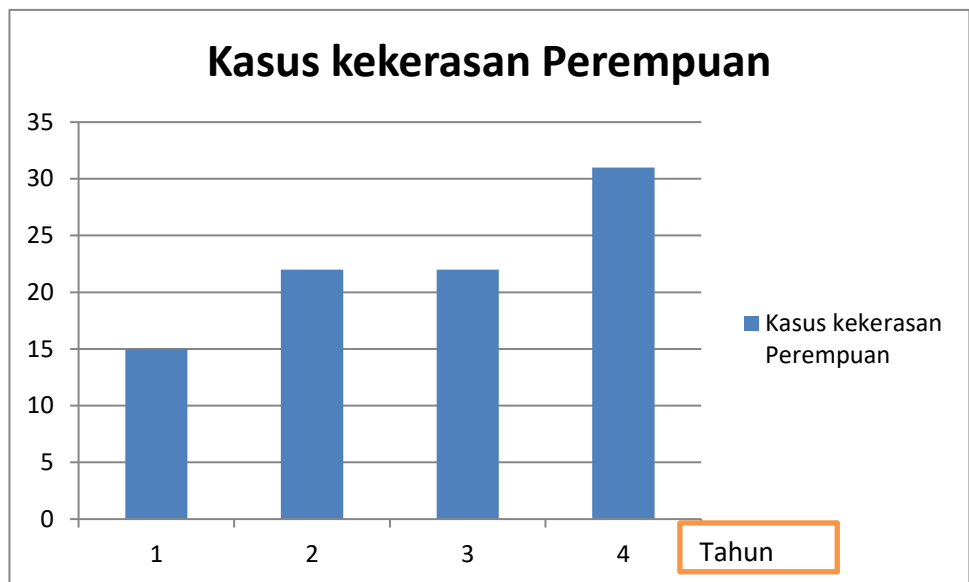
Untuk Formula Perhitungan Realisasi kinerja ini dimana apabila semakin tinggi realisasi semakin menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi/baik kinerja maka pengukuran kinerja mengacu pada LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 dengan rumus capaian % yaitu ***Target-(realisasi-Target) dibagi Target dikali 100%.***

Analisis Ketercapaian sasaran indikator ini Pada Tahun 2024 adalah 0,028% atau persentase capaian sebesar 66,66 % dari target

0,021%. Dengan kategori capaian Sedang Sedangkan bila dibanding dengan tahun 2023 lalu dengan realisasi 0,020% atau tercapai 66,66% ,maka terjadi kenaikan 0,008 %,ini terjadi karena melonjaknya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang pada tahun 2023 sebanyak 22 kasus meningkat jadi 31 kasus di Bangka Tengah. Di banding dengan akhir Rensta,maka sasaran belum berhasil tercapai.Seperti terlihat pada daftar kasus berikut ini :

Tabel III.9 Jumlah Kasus Perempuan Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan
2021	15
2022	22
2023	22
2024	31



Sumber Data Bidang Pemberdayaan Perempuan

Indikator sasaran Kinerja Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO ini didukung oleh Program Perlindungan Perempuan dengan sasaran kinerja Berkurangnya kasus kekerasan terhadap

perempuan dan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan.

Faktor Pendukung Tercapainya target indikator sasaran program ini adalah :

1. Adanya UPTD PPPA DPPPAPPKB yang selalu melakukan koordinasi dengan dinas atau unit terkait di kabupaten/Kota.
2. Adanya SK Tim Gugus Tugas Pencegahan TPPO di kabupaten Bangka Tengah yang melibatkan APH dan OPD terkait.d

Faktor Penghambat Tercapainya target indikator sasaran program ini adalah :

1. Masih Rendahnya koordinasi antar lintas sector dalam penanganan TPPO.

Solusi /Upaya yang telah dilakukan untuk Peningkatan Kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bimtek/Sosialisasi tentang penanganan TPPO kepada seluruh stake holder dan masyarakat
2. Melakukan Rapat-rapat koordinasi dengan APH dalam penanganan kasus TPPO.

Kinerja sasaran 4: Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Anak

Kinerja Sasaran Meningkatnya Menurunnya Angka Kekerasan terhadap anak diukur dengan formula perhitungan: Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dibagi jumlah pengaduan/laporan ke unit pelayanan terpadu dikali 100%.

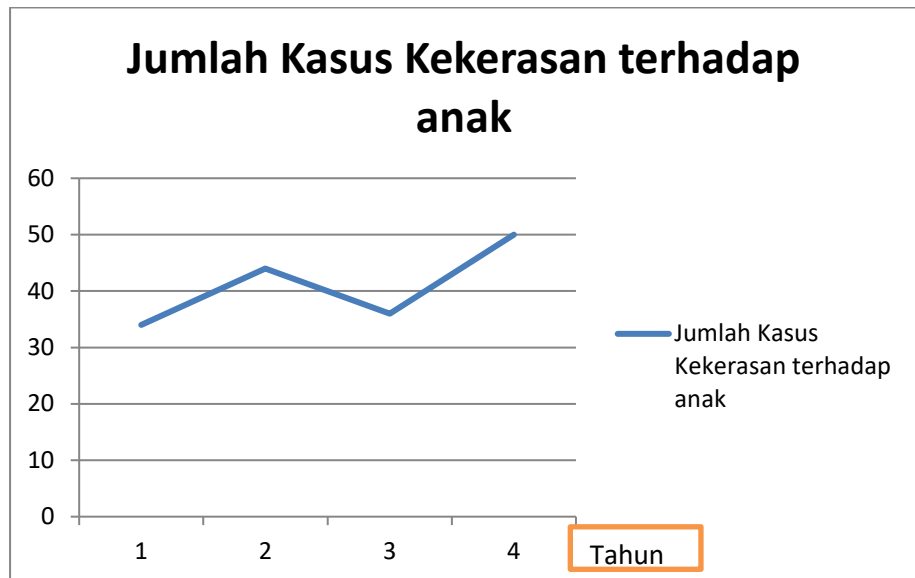
Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE 2021	REALISASI /CAPAIAN 2022	REALISASI /CAPAIAN 2023	TAHUN 2024			CAPAIAN S.D 2024 TERHADAP TARGET 2026
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	
1	2	3	5	6		7	8	9	11
1	Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	100	100	100	100

Analisis Ketercapaian Sasaran Kinerja Tahun 2024 adalah 100% atau sebesar 100% dari target 100 %. Pada Tahun 2023 sama dengan capaian 2024,dengan kategori sangat baik.semua korban kekerasan anak terlayani dengan baik.Capaian kinerja ini didukung oleh adanya Perda tentang pencegahan perkawinan pada usia anak,kerjasama dengan kementerian agama untuk upaya penurunan perkawinan Pada Usia anak serta adanya peran aktif lembaga anak seperti Forum Anak,Forum Genre.Dibandingkan dengan target renstra akhir RPJMD 100%. capaian sasaran tercapai.

Tabel III.10 Jumlah Kasus terhadap anak tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap anak	34	44	36	50



Sumber Data Bidang Perlindungan Anak

Keberhasilan capaian indikator Persentase korban kekerasan anak yang terlayani didukung oleh : Program 1.Perlindungan Khusus Anak,dengan sasaran program Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak,dan indikator kinerja Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan.2.Program Pemenuhan Hak Anak dengan sasaran program : Terbina nya lembaga layanan pemenuhan hak anak,dan Indikator kinerja: Persentase lembaga layanan pemenuhan hak anak yang dibina.

Faktor Pendukung Tercapainya target indikator sasaran program ini adalah :

1.Adanya Jejaring kerja dari DPPKBPPPA,UPTD PPPA,UPPA POLRES,DINSOS,DINKES,RS ABU HANIFAH,PUSKESMAS,KEJAKSAAN,PENGADILAN NEGERI,HIMPSI,DINAS PENDIDIKAN,dan Organisasi/Lembaga Pemerintah dan masyarakat lainnya yang memberikan layanan kepada

anak.

2.Keterlibatan Masyarakat melalui gerakan perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM),

3.Adanya Apresiasi dari Pemerintah dibidang Anak dalam mewujudkan kabupaten Layak Anak(KLA).

4.Pemahaman masyarakat akan pentingnya laporan setiap kasus.

Faktor Penghambat Tercapainya target indikator sasaran program ini adalah :

1.Masih adanya pandangan masyarakat bahwa kasus kekerasan adalah masalah intern dalam rumah tangga,sehingga kejadian sering berulang.

2.Masih belum adanya Gedung layanan terpadu yang refresentative untuk memberikan layanan pelatihan,dan penanganan secara komprehensif terutama bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

3.Masih Terbatasnya SDM

4.Masih Banyak nya anak putus sekolah dan anak-anak terlantar

Solusi /Upaya yang telah dilakukan untuk Peningkatan Kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

1.Memperbanyak sosialisasi

2.Melaksanakan Pelatihan SDM

3.Memperkuat Jejaring Kerja

Kinerja sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD diukur dengan Capaian Nilai SAKIP yang di revieu oleh inspektorat Bangka Tengah.Pada Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 80 % atau sebesar 94,06 % dari capaian target 80%. Dengan kategori capaian sangat

Baik (BB). Dari Hasil LHE AKIP Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DPPKBPPPA) mendapat Nilai 75,25 kategori BB yang dapat dilihat pada Tabel Hasil LHE AKIP tahun 2023.Untuk Tahun 2024 masih dalam tahap Reviu dari Inspektorat.

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal	25	19,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,25 (BB)

Sumber data LHE ITKAB 2024

Keberhasilan capaian indikator Nilai SAKIP DPPKBPPPA didukung oleh Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dengan sasaran Program Meningkatnya Nilai SAKIP DPPKBPPPA dan meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah.

Faktor Pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- 1.Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan bawahanan(TIM kerja) dalam rangka pelaksanaan program,kegiatan,dan sub kegiatan.
- 2.Kerja sama lintas bidang dalam pencapaian kinerja.

Faktor Penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- 1.Jumlah SDM yang kurang menyebabkan beban kerja bertambah
- 2.Pencapaian outcome yang diliris pada pertengahan tahun berjalan menyebabkan realisasi kinerja sulit diukur.

Dibandingkan dengan target renstra akhir RPJMD 80% capaian sudah terpenuhi. Untuk Sasaran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.11 Nilai SAKIP DPPKBPPPA tahun 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				CAPAIAN S.D 2024 TERHADAP TARGET 2026
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	
1	3	5		6		7	8	9		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP DPPKBPPPA	-	77,30	75,25	80	75,25	94,06	80	94,06

3.2 Realisasi Anggaran



Realisasi anggaran yang digunakan terdiri dari 9 Program dengan rata-rata capaian 89% dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja diuraikan sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	88.980.000	75.729.600	85,11%
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	263.930.000	181.209.647	81,08%
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	121.490.000	108.870.000	89,61%
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	54.510.000	53.871.200	98,83%
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PKA)	307.062.500	217.987.345	70,99%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.753.951.100	4.366.755.766	91,86%

	KABUPATEN/KOTA			
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	217.058.000	196.707.786	90,62%
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	1.761.578.000	1.719.392.827	97,61%
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	1.295.355.000	1.287.383.810	99,38%
	TOTAL	8.863.914.600	8.187.907.981	92,37%

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

NO	JUDUL KEGIATAN	DOKUMENTASI
1.	<p>Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban kekerasan</p> <p>Dokumentasi : Bidang PP</p>	

2.	<p>Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting</p> <p>Dokumentasi : Bidang PPKB</p>	 <p>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH</p>
3.	<p>Edukasi Cegah Perkawinan Usia Anak, Membangun Generasi EMAS</p> <p>Dokumentasi : Bidang PA</p>	 <p>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH</p>

4.	<p>Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Kabupaten Bangka Tengah</p>	
----	---	--

Faktor Pendukung keberhasilan Program Kegiatan di DPPKBPPPA :

- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN(DAK PPPA DAN DAK BOKB)
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Faktor Penghambat keberhasilan Program Kegiatan

- Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran.

3.3 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran (7-8)
			Target	Realisasi	% capaian Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Capaian modern modern Contraceptive Prevalensi Rate (mCPR)	Persentase Capaian Modern Contraceptive Prevalensi Rate (mCPR)	77,10	80,80	104,79	3.266.019.810	3.203.484.423	98,08	1,92
2	Meningkatnya Peran OPD dalam Melaksanakan Penganggaran yang Responsive Gender	Persentase OPD dalam Melaksanakan/Mengimplementasikan Penganggaran yang Responsive Gender	80	80	100	210.410.000	184.599.600	87,73	12,27
3	Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,021	0,028	99,93	263.930.000	161.209.647	61,08	38,92

4	Menurunnya angka kekerasan terhadap anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	361.572.500	271.858.545	75,18	24,82
5	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP DPPKBPPPA	80	75,25	94,06	4.753.951.100	4.366.755.766	91,86	8,14
Total Belanja						8.863.914.600	8.187.907.981	92,37	8,63

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran DPPKBPPPA Bangka Tengah melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp **8.863.914.600** ,-terrealisasi Rp **8.187.907.981** atau 92,37 sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 225.249.400 atau sebesar 8,63% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi biaya makanan dan minuman

3.2 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. SIWA KENCANA (WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/ permasalahan aplikasi kinerja).
- b. Aplikasi SIPELINDUNG(Sistem Informasi Perempuan Terlindungi)
- c. Aplikasi KISANAK(Kita Sayang Anak)
- d. DENTING(Dapur Atasi Stunting).

3.3 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2024 DPPKBPPPA Bangka Tengah telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Anugerah Parahita Eka Praya (APE) dari kementerian PPPA
2. Anugerah Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan Predikat Nindya
3. Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Nomor 1 tingkat Nasional
4. Kategori Kinerja Perangkat Daerah dalam Bangga Kencana Juara 1 Tingkat Provinsi
5. Kampung KB Terbaik Desa Keratai Juara 1 Tingkat Provinsi
6. Apresiasi I Bangga Award Kabupaten Bangka Tengah Juara 1 Tingkat Provinsi
7. Capaian Pelayanan KB di Hari Kartini Juara 1 Tingkat Provinsi
8. Kategori Kinerja Perangkat Daerah dalam Bangga Kencana diberikan kepada DPPKBPPA sebagai Juara 1 Tingkat Provinsi.

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi
Peningkatan kinerja*

BAB 4

Penutup



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya Capaian Contraseptive Rate (mCPR) terdiri dari 1 indikator kinerja (Persentase Capaian Contraseptive Prevalensi Rate (dengan capaian kinerja sebesar 104,79% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 2. Meningkatnya Peran OPD dalam Melaksanakan Penganggaran yang Responsive Gender dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 3. Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Perempuan dengan capaian kinerja sebesar 66,66% (kategori Sedang).
- Sasaran 4.. Menurunnya angka kekerasan terhadap anak dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat Baik)
- Sasaran 5. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan capaian kinerja sebesar 94,06%(kategori sangat Baik).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan hanya satu(1) sasaran dengan kategori sedang,karena sasaran tergantung banyaknya kasus yang ada.

Beberapa Permasalahan lain yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar semua stake holder terkait dalam mendukung pencapaian indikator sasaran
2. Masih ada data yang menunggu rilis dari BPS dan BKKBN Pusat
3. Kurang nya sumber Daya Manusia sehingga banyak kegiatan yang harus dilakukan sehingga ada nya double job(rangkap Jabatan) seperti di UPT PPPA yang SDM nya hanya terdapat 1 orang saja yaitu kepala UPT PPPA saja.

Dalam Upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang,strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama seluruh stake holder agar semakin giat dalam mengejar target yang telah ditentukan.

- Mengupayakan data yang dikeluarkan oleh dinas yang menangani indikator tersebut,sehingga tidak menunggu data yang dikeluarkan dari BPS.
- Menambah sumber Daya Manusia(SDM) DPPKBPPPA khususnya UPTD PPPA

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja

yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.863.914.600 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.187.907.981 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 92,37% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 8,63%. Ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk ber-KB cukup tinggi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus-kasus sudah baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM**
JABATAN : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **ERA SUSANTO, S.H**
JABATAN : Plt.BUPATI BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

ERA SUSANTO,SH
Plt.Bupati Bangka Tengah

PIHAK PERTAMA,

dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19710527 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa IV Koba Kode Pos : 33181

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON II)

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
1	Meningkatnya Capaian Contraceptive Prevalensi Rate (CPR)	1	Persentase Capaian Contraceptive Prevalensi Rate (CPR)	%	77,10
2	Meningkatnya Peranan OPD dalam penganggaran yang responsive gender	2	Persentase OPD yang memiliki anggaran Responsive Gender	%	70,00
3	Menurunnya Angka kekerasan Terhadap Perempuan	3	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	0,023
4	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Anak	4	Persentase Korban kekerasan anak yang terlayani	%	100
5	Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	5	Nilai Evaluasi Kinerja (SAKIP) DPPKBPPPA	Nilai	BB(80)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.88.980.000	APBD-P
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp.263.930.000	APBD-P
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.121.490.000	APBD-P
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp.54.510.000	APBD-P
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.303.510.000	APBD-P
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.4.753.935.100	APBD-P
7	Program Pengendalian Penduduk	Rp.217.058.000	APBD-P

8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp.1.761.578.000	APBD-P
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	Rp.1.295.355.000	APBD-P
	JUMLAH	Rp.8.863.914.600	

Koba, 16 Oktober 2024

KEPALA DPPKBPPPA,



dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM

Pembina Utama Muda /IV C

NIP. 19710527 200501 2 008



PERJANJIAN KINERJA(PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **Drs.ROHENDA**

JABATAN : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM**

JABATAN : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19710527 200501 2 008

PIHAK PERTAMA,

Drs.ROHENDA
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 19767 071219992031013



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa IV KOBAKode Pos : 33181

PERJANJIAN KINERJA(PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON III)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	BB (80)

Program	Anggaran	Keterangan
1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.753.951.100	APBDP

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 19710527 200501 2 008

PIHAK PERTAMA,

Drs.ROHENDA
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196707121992031013



PERJANJIAN KINERJA(PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **WARYUDI,SIP**

JABATAN : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM**

JABATAN : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710527 200501 2 008

PIHAK PERTAMA,

WARYUDI,SIP
Pembina / IV a
NIP. 197003222005011007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Jabatan Eselon III : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
TahunAnggaran : KELUARGA BERENCANA KESEJAHTERAAN
KELUARGA
: 2024

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sekolah Siaga Kependudukan yang dibentuk	Jumlah sekolah siaga kependudukan yang dibentuk	4 sekolah
2	Meningkatnya cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	6,8%
3	Meningkatnya Jumlah Pembinaan kelompok kegiatan yang dibina	Persentase Cakupan kelompok kegiatan yang dibina	80%


PROGRAM :	ANGGARAN
1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 217.058.000
2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB)	Rp. 1.761.578.000
3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 1.295.355.000
TOTAL ANGGARAN	Rp 3.273.991.000

PIHAK KEDUA,



dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710527 200501 2 008

Koba, 16 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,



WARYUDI, SIP
Pembina / IVa
NIP. 197003222005011007



PERJANJIAN KINERJA(PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **DESTA NOVIAR,SKM,MM**

JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM**

JABATAN : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 19710527 200501 2 008

PIHAK PERTAMA,

DESTA NOVIAR, SKM.MM
Pembina / IVa
NIP 19761115 200501 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PPPA
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Jabatan Eselon III : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
Tahun Anggaran : **2024**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang berperan dalam pembangunan	80%
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan yang terselesaikan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pembinaan organisasi perempuan	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100%

PROGRAM :

ANGGARAN

1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 88.980.000
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 263.930.000
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 121.490.000
TOTAL ANGGARAN		Rp 474.440.000

PIHAK KEDUA,



dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710527 200501 2 008

Koba, 16 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,



DESTA NOVIAR, SKM., MM.
Pembina / IVa
NIP. 19761115 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa IV KOBAA Kode Pos : 33181

PERJANJIAN KINERJA(PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **HENDRI NOVIYARTO,S.IP,MAP**

JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM**

JABATAN : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 19710527 200501 2 008

PIHAK PERTAMA,

HENDRI NOVIYARTO,S.IP,MAP
Pembina/ IV a
NIP. 198311282009031002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PPPA
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Jabatan Eselon III : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Tahun Anggaran : 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	100%
2	Meningkatnya Layanan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	21,90 %

PROGRAM :

ANGGARAN

1 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Rp. 54.510.000

2 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Rp. 307.062.500

TOTAL ANGGARAN

Rp.361.572.000

PIHAK KEDUA,



dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
Pembina Muda Tingkat I / IVc
NIP. 19710527 200501 2 008

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,



HENDRI NOVIYARTO, S.IP, MAP
Penata Tingkat I / IV a
NIP. 198311282009031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa IV KOBAKode Pos : 33181

PERJANJIAN KINERJA(PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **FAHROZI,S.AP**

JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Drs.Rohenda**

JABATAN : Sekretaris

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,


Drs.ROHENDA

Pembina Utama Muda / IVc
NIP 1967071219992031013

PIHAK PERTAMA,


FAHROZI,S.AP

Penata Tingkat I/ IIId
NIP 197403082006041011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Jabatan Eselon IV : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tahun Anggaran : 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pelayanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
2	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%
3	Meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
4	Tersedianya pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	Persentase cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	100%

KEGIATAN:

ANGGARAN

1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 186.940,000.00
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 6.800.000,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.425.616.300,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Rp.424.756.000,00
TOTAL ANGGARAN		Rp 1.044.112.000.00

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


Drs.ROHENDA
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710527 200501 2 008


FAHROZI, S.AP
Penata Tingkat I / IIId
NIP. 197403082006041011



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa IV KOBAKode Pos : 33181

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **Evi Kurniati,S.Kom**
JABATAN : KEPALA UPTD PPPA
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **HENDRI NOVIYARTO,S.IP,MAP**
JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

HENDRI NOVIYARTO,S.IP,MAP
Pembina / IV a
NIP 19831128 2009031002

PIHAK PERTAMA,

Evi Kurniati,S.Kom
Penata / IIIc
NIP 19830808 20100120111

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Jabatan Eselon IV : KEPALA UPTD PPPA

Tahun Anggaran : 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi Layanan Rujukan yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah Koordinasi Layanan Rujukan yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan	4 kali
2	Tersedianya Layanan Kasus kekerasan terhadap anak korban kekerasan	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak yang terlayani	40 kasus

KEGIATAN:

ANGGARAN

1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/kota	Rp 182.360,000.00
2	Penyediaan Lanjutan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan kabupaten/kota	Rp.119.240.000,00
TOTAL ANGGARAN		Rp 301.600.000.00

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



HENDRI NOVIYARTO,S.IP,MAP
Pembina / IV a
NIP 19831128 2009031002



Evi Kurniati,S.KOM
Penata / IIIc
NIP. 198308082010012011



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa IV KOBAKode Pos : 33181

PERJANJIAN KINERJA(PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **HOTIJAH,S.IP**

JABATAN : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPPA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Evi Kurniati,S.KOM**

JABATAN : KEPALA UPTD PPPA

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

Evi Kurniati,S.KOM
Penata / Ilc
NIP. 198308082010012011

PIHAK PERTAMA,

HOTIJAH,S.IP
Penata Tingkat I/ Illd
NIP 197605201998032003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Jabatan Eselon IV : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPPA

Tahun Anggaran : 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pelayanan untuk mendapatkan perlindungan terhadap perempuan	Jumlah Layanan pengaduan terhadap permasalahan perempuan	1 Laporan
		Jumlah koordinasi layanan rujukan yang diberikan terhadap perempuan	4 kali
2	Terlaksananya Pelayanan untuk mendapatkan perlindungan terhadap anak	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	4 lembaga
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak	40 Orang

KEGIATAN:

ANGGARAN

1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp 182.360,000.00
2	Koordinas dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Kekerasan Kewenangan kabupaten/kota	Rp.119.240.000,00
TOTAL ANGGARAN		Rp 301.600.000.00

Koba, 16 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Evi Kurniati, S.KOM
Penata / Ilhc
NIP. 198308082010012011



HOTIJAH, S.IP
Penata Tingkat I / Illd
NIP. 19760520198032003



2PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa 4 Koba-33181 Telp/Fax. (0718) 4222009

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR: 188.47 /38 /DPPKBPPPA/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan renstra 2021-2026 berdasarkan hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tanggal 03 Agustus 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Lembaran Negara RI Tahun 2003

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tahapan,tata cara Penyusunan,Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah(LD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 269);
8. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan,susunan organisasi,Tugas dan Fungsi,serta Tata cara kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, digunakan untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja,

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah dan disampaikan kepada Bupati Bangka Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA,



dr.Hj.Dede Lina Lindayanti,MKM
PEMBINA UTAMA MUDA/IV C
NIP.197105272005012008

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
DPPKBPPPA
Kabupaten Bangka Tengah

Nomor :
Tanggal : Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH

TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
2. Perencanaan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya capaian Contraceptive Prevalensi Rate (CPR)	Persentase capaian Contraceptive Prevalensi Rate (CPR)	Kepala DPPKBPPPA	BPS	$CPR = \frac{\text{Jumlah pasangan usia subur aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Kepala DPPKBPPPA	Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah perempuan yang bekerja}} \times 100$
3	Meningkatnya Peran OPD dalam Penganggaran yang responsive gender	Persentase OPD yang memiliki anggaran responsive gender	Kepala DPPKBPPPA	Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki ARG}}{\text{Semua OPD}} \times 100\%$

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
4	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Kepala DPPKBPPPA	Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100\%$
5	Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Anak	persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Kepala DPPKBPPPA	Laporan Bidang Perlindungan Anak	$\frac{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$
6	Menurunnya Angka Perkawinan Anak	Persentase Perkawinan Anak	Kepala DPPKBPPPA	Laporan Bidang Perlindungan Anak	$\frac{\text{Jumlah perempuan usia 20 – 24 tahun yang menikah dibawah usia 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk perempuan usia 20 – 24 tahun}} \times 100\%$
		Persentase Desa Layak Anak	Kepala DPPKBPPPA	Laporan Bidang Perlindungan Anak	$\frac{\text{Jumlah desa layak anak}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$
		Lembaga Pemenuhan Hak Anak	Kepala DPPKBPPPA	Laporan Bidang Perlindungan Anak	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak se kabupaten

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2021)	Target			
			2022	2023	2024	2026
1	Persentase capaian Contraceptive Prevalensi Rate (CPR)	74,98%	75%	75,02%	75,04%	75,08%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	35,80%	36,20%	36,30%	36,40%	36,60%
3	Persentase OPD yang memiliki anggaran responsive gender	-	-	60%	70%	90 %
4	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,025	0,024	0,022	0,021	0,019
5	persentase korban kekerasan anak yang	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2021)	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
	terlayani						
6	Persentase Perkawinan anak	23,31%	23,20%	23%	21,90%	20,85%	19,75%
7	Persentase Desa Layak Anak	10	20	25	30	40	50
8	Lembaga Pemenuhan Hak Anak	4	4	4	5	7	8



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telp. (0718) 7362019, Fax(0718) 7362019
Email : inspektoratbateng@gmail.com

Koba, 27 Mei 2024

Nomor : 710/69/ITDAKAB/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bangka Tengah
di –
Koba

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bangka Tengah. Pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2024
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah dengan nilai sebesar **75,25** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) **"sangat baik"**.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja, namun masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penjabaran kinerja yang disusun dalam *cascading* belum seluruhnya memenuhi prinsip logis dan belum seluruhnya menggambarkan hubungan sebab akibat sehingga penetapan kondisi kinerja antar level menjadi berulang;
- 2) Penjabaran kinerja dalam *cascading* belum disusun sampai ke level individu;
- 3) Perjanjian kinerja Kepala OPD tidak selaras dengan dokumen IKU dan *cascading*; dan
- 4) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai ke level individu belum sepenuhnya selaras dengan *cascading*.

b. Pengukuran Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja per triwulan, yang rutin dilaporkan pencapaian kinerjanya dalam monev rencana aksi yang telah disusun. Namun masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang; dan
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Monev Capaian Kinerja ataupun Notula Rapat Monev Capaian Kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, namun masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi belum berjalan secara optimal dikarenakan *feedback* yang diberikan belum berjalan dua arah;
- 2) Belum disusunnya Laporan Capaian Kinerja secara Berkala oleh Tim Penyusun LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah; dan
- 3) Terdapat ketidakselarasan antara dokumen laporan kinerja (LAKIP) dengan Perjanjian Kinerja Kepala OPD.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Tim Penyusun LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah sebatas menindaklanjuti hasil evaluasi oleh Tim Evaluator Kabupaten, sehingga masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tim Evaluasi Internal Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya melakukan *Self Assessment* dengan pendalaman yang memadai; dan

- 2) Hasil *Selft Assessment* dan rencana aksi tindak lanjutnya belum didokumentasikan dalam bentuk laporan.

4. Rekomendasi

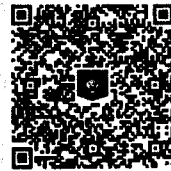
Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyempurnaan pohon kinerja dengan memastikan telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang;
- 2) Melakukan penyempurnaan cascading agar penjabaran kinerja semakin selaras dan berkesinambungan sampai ke level individu;
- 3) Melakukan penyempurnaan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai ke level individu yang diselaraskan dengan pohon kinerja dan *cascading*;
- 4) Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian target kinerja secara berkala sampai ke level individu;
- 5) Menyusun Laporan Kinerja secara berkala dan mendokumentasikan hasil reviu Laporan Kinerja secara berjenjang;
- 6) Analisis Capaian Kinerja dalam LAKIP agar dilakukan secara memadai dan diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Kepala OPD;
- 7) Tim Evaluasi Internal agar menyusun Kertas kerja *Selft Assessment* dan Rencana Aksi Tindak lanjut atas Hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara memadai; dan
- 8) Mendorong pelaksanaan implementasi SAKIP kepada seluruh pegawai dan memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi oleh Tim Inspektorat dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan di tahun berjalan.

Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

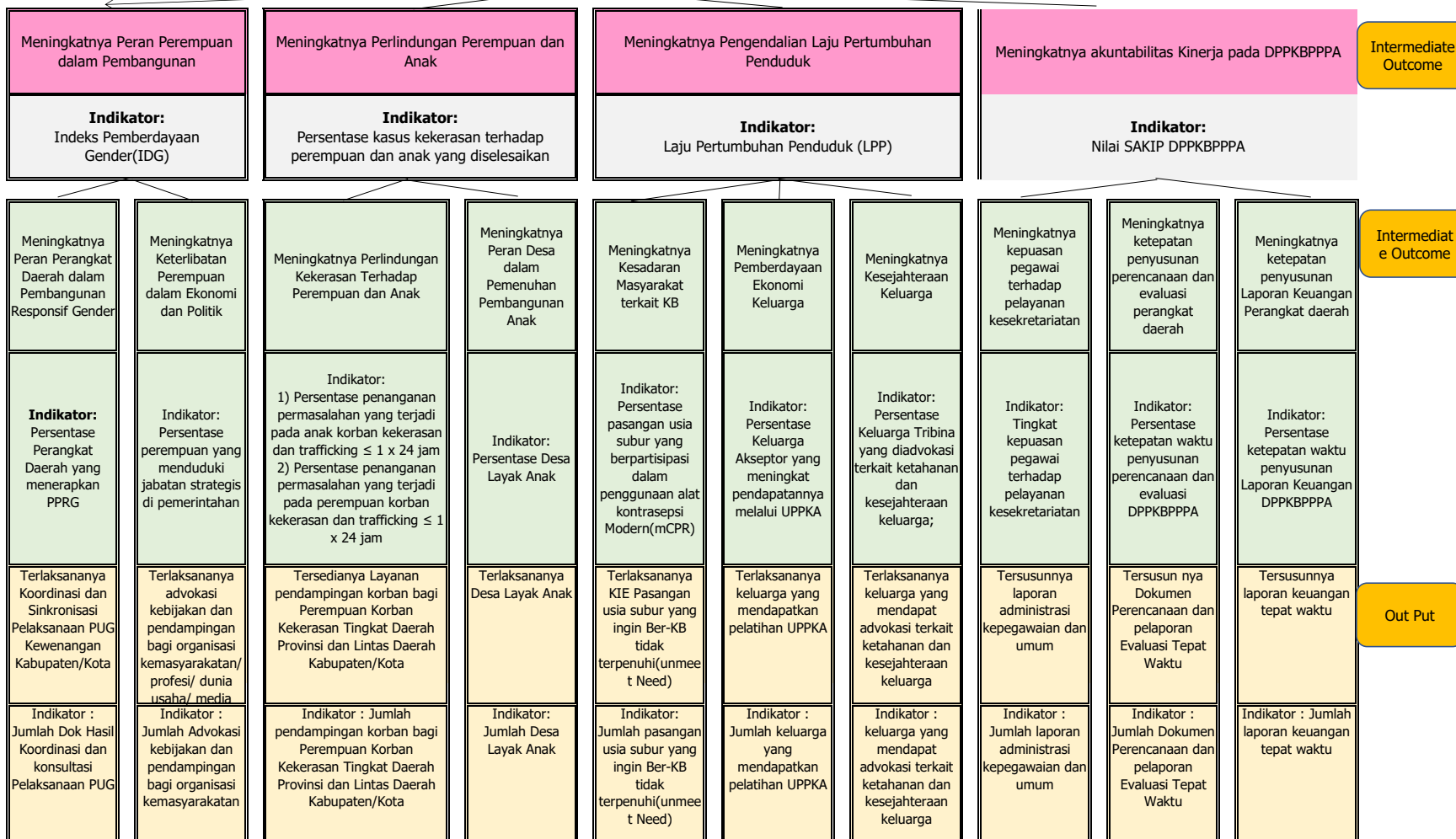


Drs. Pittor, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650528 199203 1 005

Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas

Final

Indikator:		
2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	3. Indeks
Perlindungan Anak (IPA)		



MAJU SUMBER DAYA MANUSIA

RPJMD Misi Ke-3

Sasaran
OPD/Ess 2

Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas

Indikator:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Perlindungan Anak (IPA)

3.

Sasaran Program
OPD/Ess 3

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan
Indikator: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
Indikator: Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
Indikator: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pada DPPKBPPA
Indikator: Nilai SAKIP DPPKBPPA

Sasaran Keg/Ess 4

Meningkatnya Peran Perangkat Daerah dalam Pembangunan Responsif Gender
Indikator: Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan PPRG
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan PUG
BAPELITBANGDA

Meningkatnya Keterlibatan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik
Indikator: Persentase perempuan yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan
Indikator : Jumlah Advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan

Meningkatnya Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Indikator: 1) Persentase penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam 2) Persentase penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
DINSOS PMD, DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya Peran Desa dalam Pemenuhan Pembangunan Anak
Indikator: Persentase Desa Layak Anak
Terlaksananya Desa Layak Anak
Indikator: Jumlah Desa Layak Anak

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terkait KB
Indikator: Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi Modern (mCPR)
Terlaksananya KIE Pasangan usia subur yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (unmet Need)
Indikator: Jumlah pasangan usia subur yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (unmet Need)
DINSOS-PMO, DINKES,

Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Indikator: Persentase Keluarga Akseptor yang meningkat pendapatannya melalui UPPKA
Terlaksananya keluarga yang mendapatkan pelatihan UPPKA
Indikator : Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan UPPKA

Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
Indikator: Persentase Keluarga Tribina yang diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
Terlaksananya keluarga yang mendapat advokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Indikator : keluarga yang mendapat advokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan
Indikator: Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan
Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian dan umum
Indikator : Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan umum

Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
Indikator: Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi DPPKBPPA
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pelaporan Evaluasi Tepat Waktu
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan Evaluasi Tepat Waktu

Meningkatnya ketepatan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah
Indikator: Persentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan DPPKBPPA
Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu
Indikator : Jumlah laporan keuangan tepat waktu

Sasaran
Sub.keg/Staff Pelaksana

CROSS CUTTING
OPD



ANGGARAN